

OPEN ACCESS

Citation: Alvaro, R; Aida, AN; Syafri, RA. (2023). Analisis Transformasi Struktur Ekonomi Pada Daerah Otonom Baru. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 176-195

Received: September 5, 2023
Revised: October 27, 2023
Accepted: October 31, 2023
Published: November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI PADA DAERAH OTONOM BARU

Analysis of The Economic Structure Transformation In The New Autonomous Region

Rendy Alvaro¹⁾, Ade Nurul Aida²⁾, Riza Aditya Syafri^{3*)}

^{1,2,3)} Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

email: ¹⁾ rendy.alvaro@dpr.ri, ²⁾ ade.aida@dpr.ri, ³⁾ riza.syafri@dpr.ri

Abstract

The aim of this research is to examine what sectors can be developed and have competitiveness, as well as determine changes in the economic structure of the new autonomous regions, including South Papua, Central Papua, Mountain Papua, and Southwest Papua. This research uses the LQ method and shift-share analysis. The results of sector mapping in 2010 and 2019 show that sectors are undergoing transformation, namely the Information and Communication sector, Education Services, Government Administration, Defense and Mandatory Social Security, other services, and the processing industry. Then the shift-share analysis shows that the processing industry and the Agriculture, Forestry, and Fisheries sectors do not have relatively good competitiveness when compared with the same sectors on a national scale. The results of the Klassen Typology show that throughout the Papua region, the Government Administration, Defense, and Mandatory Social Security sectors are in Quadrant I. Meanwhile, the Accommodation and Food and Drink Provision sectors and Electricity and Gas Procurement throughout the Papua region are in Quadrant III. For this reason, apart from incentive support, policy support is needed from the central government and governments in DOB.

Keywords: *new autonomous region, location quotient, shift-share.*

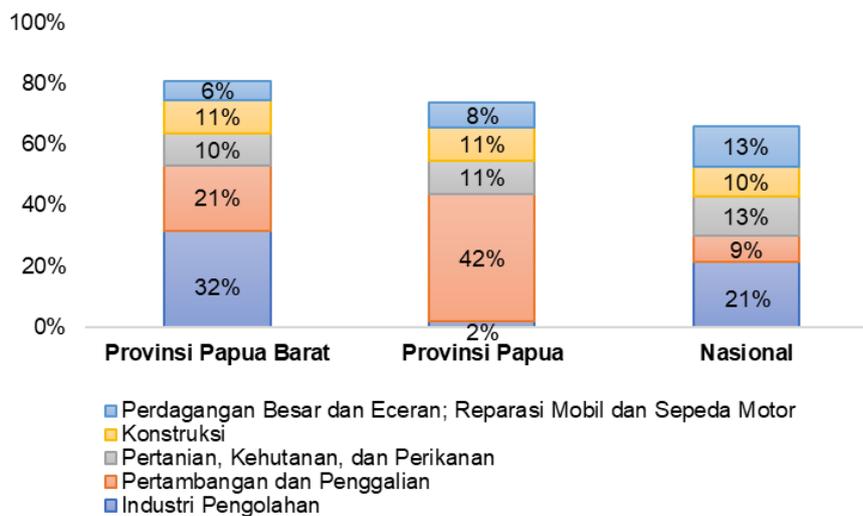
JEL Classifications: *O11; O14; O31; R11; R58.*

I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua dan Papua Barat hingga kini masih menjadi dua provinsi dengan indikator pembangunan yang terendah di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya hingga tahun 2022, Provinsi Papua Barat dan Papua masih berada pada peringkat 33 dan 34 dari 34 provinsi di Indonesia. Sama halnya dengan IPM, kondisi kemiskinan di Provinsi Papua Barat dan Papua hingga tahun 2022 juga masih sangat tinggi. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia hingga tahun 2022, diikuti oleh Provinsi Papua Barat pada peringkat kedua.

Belum baiknya kondisi sosial ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Struktur perekonomian pada suatu wilayah menjadi faktor fundamental yang memengaruhi kinerja perekonomian di wilayah tersebut, sehingga perbedaan struktur perekonomian antar daerah akan menghasilkan perbedaan pada capaian pembangunan yang dihasilkan (Constantine, 2017).

Struktur perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat cenderung masih bertumpu pada sektor-sektor primer dan komoditas yang bersumber dari faktor-faktor alam. Dilihat dari struktur perekonomiannya, sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Papua berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 11 persen dari PDRB Provinsi Papua. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat, sekitar 20 persen PDRB-nya berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, serta 10 persen berasal dari sektor pertanian.



Gambar 1. Rata-Rata Proporsi PDRB di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah).

Sektor primer seperti pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian seringkali dianggap sebagai sektor yang memiliki nilai tambah yang rendah, serta tidak bertahan dalam jangka panjang karena terkendala persoalan lahan yang semakin terbatas dan sumber daya alam yang terus berkurang (Rosmeli, 2022). Selain nilai tambah yang rendah, tenaga kerja pada sektor primer juga seringkali dikelompokkan sebagai tenaga kerja informal. Berdasarkan definisi International Labour Organization (ILO, 2004), menyebutkan ciri-ciri pekerja informal dimana beberapa diantaranya (i) skala usahanya relatif kecil dan merupakan usaha keluarga; (ii)

minimnya perlindungan sosial dan hak tertentu terkait jaminan kerja; (iii) tenaga kerjanya terdidik atau terlatih dalam pola-pola tidak resmi. Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2022 jumlah pekerja di sektor informal pada Provinsi Papua mencapai 84,11 persen, sementara Papua Barat sebesar 60,28 persen.

Kondisi lainnya yang berkontribusi terhadap belum berkembangnya struktur perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat disebabkan juga oleh luasnya wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 319.036 km² menjadikannya provinsi dengan luas wilayah terbesar dibandingkan 33 provinsi lainnya. Sementara Provinsi Papua Barat, memiliki luas wilayah sebesar 102.955 km². Besarnya luas wilayah kedua provinsi di Papua tersebut menjadikan rentang kendali pemerintah terhadap pembangunan di daerahnya menjadi kurang optimal.

Atas dasar tersebut, pemerintah bersama DPR RI mengesahkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2022 sebagai pemekaran wilayah di Papua. Provinsi baru yang terbentuk yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran wilayah dari Provinsi Papua. Sementara pada Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi 2 wilayah, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Tujuannya, agar rentang kendali pemerintahan dapat lebih pendek, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam melayani kebutuhan masyarakatnya.

Hingga tahun 2023, secara total terdapat 38 provinsi di Indonesia, dari yang sebelumnya 34 provinsi. Harapannya dengan dilakukannya pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat dapat meningkatkan kemandirian daerah maupun kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kemandirian daerah sendiri dapat direfleksikan dari kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan, maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Sintia, 2017). Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020).

Sebagai momentum terhadap pembentukan DOB di wilayah Papua, perlunya dilakukan pemetaan terhadap potensi-potensi perekonomian pada masing-masing wilayah DOB di Papua, sehingga dapat menjadi gambaran yang lebih jelas dalam pembangunan perekonomian di DOB. Pengembangan sektor-sektor strategis dan potensial yang sesuai dengan karakteristik daerahnya untuk dapat memajukan perekonomian yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

Berbagai penelitian terdahulu secara parsial telah mengidentifikasi sektor-sektor strategis dan potensial di wilayah Papua. Maspaitella et.al. (2021) mengidentifikasi bahwa sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor basis di Kabupaten Teluk Bintuni selama tahun 2010 – 2018. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman et.al. (2023), yang menyebutkan bahwa industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan peranan yang cukup penting terhadap perekonomian di Provinsi Papua Barat.

Sedangkan pada Provinsi Papua, hasil penelitian Kurniawati et.al. (2022) menjelaskan bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa kesehatan menjadi sektor prioritas yang dapat didorong untuk mengoptimalkan PDRB Provinsi Papua. Sedangkan penelitian De Fretes (2017) dengan metode *Location Quotient* (LQ) mengidentifikasi bahwa sektor unggulan di Provinsi Papua diantaranya Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas;

Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Layanan Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jamsostek; Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, belum ditemui analisis berdasarkan data-data pada DOB baru yang ada di wilayah Papua. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba mengkaji lebih jauh mengenai struktur perekonomian pada DOB di wilayah Papua dengan menggunakan pendekatan LQ, *Shift-share*, dan Tipologi Klassen. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat kesiapan DOB Papua ke depan dalam memetakan struktur pembangunan dan ekonominya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan dan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 lahir sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Amandemen Kedua tahun 2000, yang mengamatkan perlunya undang-undang khusus untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah alat politik dan manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kemajuan masyarakat lokal, terutama dalam menghadapi tantangan global, mendorong kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, dan mengembangkan demokrasi (Ridhuan, 2019). Salah satu bentuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri (Viphindratin & Cahyo, 2016). Sehingga, pemerintah daerah akan cenderung secara bertahap, berusaha mengurangi ketergantungannya pada Pemerintah Pusat (Sanga, *et al.*, 2018).

Urgensi perencanaan pembangunan berkaitan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, seperti ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Perencanaan pembangunan suatu wilayah atau daerah otonom sangat penting karena beberapa alasan (Kholik, 2020):

- a. Perencanaan dianggap sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik, memberikan alasan yang kuat untuk melakukannya.
- b. Perencanaan diharapkan memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan.
- c. Dalam proses perencanaan, dilakukan perkiraan, atau prediksi, tentang apa yang akan terjadi selama periode pelaksanaan. Perkiraan dilakukan tidak hanya mengenai kemungkinan dan prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan dan risiko. Perencanaan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian sebanyak mungkin.
- d. Perencanaan memberi Anda kesempatan untuk memilih cara terbaik (*the best way*) atau kombinasi cara terbaik.
- e. Perencanaan menyusun skala prioritas. Pilih urutan berdasarkan pentingnya tujuan, sasaran, dan kegiatan bisnis
- f. Jika ada rencana, akan ada alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan evaluasi.

Selama era otonomi daerah, perencanaan pembangunan dapat membantu pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Ini terutama berlaku untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang telah sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi selama era sentralisasi. Tujuan pembangunan pemerintah adalah menyeimbangkan pertumbuhan daerah yang tertinggal dengan yang telah berkembang (Djadjuli, 2018).

Ada banyak penelitian saat ini pembahasannya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh dan Yulianti (2019) dan Putri *et al.* (2016) melihat sektor-sektor penting dalam struktur ekonomi provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor basis atau sektor unggulan di Provinsi Bangka Belitung dan Papua Barat. Adapun analisis serupa di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data provinsi sebagai acuan yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra & Maria (2019) dan Rahayu *et al.* (2018). Dari beberapa penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya sektor basis potensial bagi pembangunan daerah di Indonesia.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut teori basis ekonomi asumsi ini, suatu daerah akan memiliki sektor unggulan jika dapat menghasilkan ekspor di sektor yang sama dengan daerah lain. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah adalah kuosien lokasi (*Location Quotient/LQ*). Ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Sebagai indikator pertumbuhan wilayah, teknik LQ dapat menggunakan berbagai faktor, seperti kesempatan kerja (tenaga kerja) dan PDRB suatu wilayah (Randy, *et al.*, 2019).
- b. Dalam menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan, yaitu:

1) Analisis *Shift-Share*

Untuk menilai peran suatu sektor atau pergeseran suatu sektor terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional, analisis *shift-share* biasanya digunakan. Analisis *shift-share* juga digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor (industri) di daerah yang lebih kecil disebut daerah dengan daerah yang lebih besar disebut nasional (Tarigan, 2014).

Jika suatu wilayah memiliki banyak sektor yang berkembang dengan lambat, pertumbuhan nasionalnya juga akan lambat. Analisis *shift-share* terdiri dari tiga komponen *national share*, *proportional shift*, dan *differential shift*. Dimana, *national share* mengukur pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran ekonomi nasional. *Proportional shift* menghitung pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat nasional. Sedangkan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional dikenal sebagai *diferential shift*.

Nugroho dan Dahuri (2016) menjelaskan bagaimana perhitungan berbagai alat analisis ekonomi pembangunan wilayah dilakukan. Alat tersebut termasuk koefisien lokasi (LQ), koefisien spesialisasi (*coefficient of specialization* atau CS), Indeks Konsentrasi Industri (*Industrial Concentration Index* atau ICI), analisis *shift-share*, dan

analisis input-output. Sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah termasuk 1) analisis *shift-share*. 2) *location quotients* (LQ), 3) Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan 4) *overlay*. Analisis *shift-share* umumnya digunakan untuk menemukan sumber atau elemen pertumbuhan wilayah.

Untuk melihat perbandingan antara perubahan struktur ekonomi daerah dengan perekonomian nasional, analisis *shift-share* adalah metode yang bermanfaat. Di sini, tujuan analisis adalah untuk menentukan kinerja dan produktivitas perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar, baik regional maupun nasional.

Dalam proses perencanaan pembangunan atau pengembangan wilayah, salah satu komponen utama adalah analisis wilayah atau regional. Untuk menganalisis data statistik regional seperti pendapatan per kapita, output, tenaga kerja, dan lainnya, salah satu teknik analisis adalah analisis bagian persentase.

2) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient (LQ) didefinisikan sebagai perbandingan peran suatu industri atau sektor di suatu daerah dengan besarnya peran suatu industri atau sektor tersebut secara nasional (Tarigan, 2014). Faktor-faktor yang diperbandingkan di daerah dan nasional harus identik satu sama lain, dan waktu perbandingan harus sama. LQ memiliki dua aturan utama (Tarigan, 2014):

- a) LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa peranan sektor lebih besar di daerah daripada nasional;
- b) LQ kurang dari 1 menunjukkan bahwa peranan sektor lebih kecil di daerah daripada nasional.
- c) LQ = 1, yang menunjukkan bahwa peran industri sama baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hasil dari perhitungan analisis LQ dapat diartikan sebagai berikut (Tarigan, 2014):

- a) Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa ekspor dapat dilakukan pada sektor tersebut karena adanya surplus.
- b) LQ < 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut membutuhkan impor (produksi kekurangan sektor). Impor dilakukan karena sektor tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayah.
- c) LQ = 1, yang menunjukkan bahwa produktivitas di bidang tersebut seimbang. Artinya tidak layak untuk diekspor karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

3. PDRB Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah nilai tambah semua barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik suatu negara selama periode tertentu, tanpa memperhitungkan faktor produksi. Ini adalah salah satu indikator makro yang berfungsi untuk menunjukkan perekonomian daerah selama periode tertentu (Masruri, 2020). Ada tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan produksi.

PDRB adalah total nilai tambah dari harga barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi di daerah dalam jangka waktu tertentu, ditambah pajak atas produk neto.

b. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah total dari semua elemen permintaan akhir, termasuk konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan inventaris, dan ekspor neto selama periode waktu tertentu. Dalam studi ini digunakan PDRB (Pengeluaran) berdasarkan Lapangan Usaha.

c. Pendekatan pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa ini termasuk upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, keuntungan, dan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya sebelum dipotong pajak penghasilan.

4. Sektor Unggulan

Pada dasarnya sektor unggulan berkaitan dengan bentuk perbandingan, baik perbandingan internasional, regional, atau nasional. Dalam skala nasional, suatu sektor dapat dianggap sebagai sektor unggulan apabila dapat memenangkan persaingan di sektor yang sama dengan sektor lain (Silalahi, 2011). Potensi pertumbuhan yang lebih besar dimiliki oleh industri unggulan dibandingkan dengan industri lain di wilayah tersebut.

Sektor unggulan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi sebuah daerah. Tidak hanya terletak di lokasi geografis, tetapi juga tersebar di berbagai saluran ekonomi, memungkinkan untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, menurut Sambodo (dalam Nurlina *et al.*, 2019), karakteristik industri yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

a. Sektor ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat.

b. Industri ini memiliki distribusi yang relatif besar.

c. Sektor ini memiliki banyak hubungan antar sektor, baik depan maupun belakang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, data yang digunakan yakni dari tahun 2010 sampai tahun 2019 di kabupaten/kota daerah otonom baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Periode penelitian dibatasi sampai tahun 2019, dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2022, yang berpotensi menjadi *outlier* pada data penelitian. Data yang digunakan yakni IPM, tingkat kemiskinan, dan PDRB (Pengeluaran) berdasarkan lapangan usaha yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *location quotient*, analisis *shift-share* dan tipologi klassen.

Analisis LQ adalah suatu analisis yang digunakan untuk menentukan sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading sector*. LQ menghitung perbandingan *share* output sektor *i* di kota atau kabupaten dan

share-out sektor *i* di provinsi. Di sini, sektor unggulan mengacu pada sektor bisnis yang tidak akan habis jika dieksploitasi oleh pemerintah daerah. Hood (1998) dalam Haryanto (2021), menyatakan bahwa LQ adalah alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana yang memiliki semua manfaat dan kekurangan. Teknik LQ adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang potensial untuk pertumbuhan. LQ menghitung konsentrasi relatif kegiatan ekonomi atau derajat spesialisasi dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Sekarang ini, teknik LQ banyak digunakan dalam diskusi tentang kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi industri. Teknik LQ belum dapat menyimpulkan sektor-sektor yang dianggap strategis. Namun, untuk saat ini, sudah cukup untuk memberi gambaran tentang kemampuan suatu area dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, pendekatan Nilai Tambah/Pendapatan (PDRB) dapat digunakan untuk menghitung. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan masing-masing sektor di daerah tersebut yaitu:

$$LQ = \left[\frac{X_{ir}/X_r}{X_{in}/X_n} \right] \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

X_{ir} = sektor *i* di daerah (provinsi)

X_r = jumlah seluruh sektor di daerah (provinsi)

X_{in} = sektor *i* di wilayah yang lebih luas (nasional)

X_n = jumlah seluruh sektor di wilayah yang lebih luas (nasional)

Analisis *shift-share* bertujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang mana yang masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang lebih besar dalam ekonomi. Dengan menggunakan analisis *shift-share*, kita dapat menganalisis perubahan struktur ekonomi tersebut. Hasil perhitungan analisis *shift-share* ini akan memberikan gambaran tentang komponen yang dapat memengaruhi baik pergeseran maupun perubahan struktur ekonomi wilayah di Indonesia.

Ada tiga komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu: pertumbuhan nasional (Komponen Pertumbuhan Nasional/KPN), pertumbuhan sektoral atau bauran industri (Komponen Pertumbuhan Proporsional/KPP), dan pertumbuhan daya saing (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah/KPPW). Sementara itu, *shift-share* adalah total dari KPN, KPP, dan KPPW. Metode untuk menghitung masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN)

KPN adalah peningkatan pendapatan atau tingkat produksi suatu daerah (provinsi) agar dapat tumbuh setidaknya sama dengan laju pertumbuhan daerah acuan (nasional) dalam jangka waktu tertentu. KPN melihat struktur dan posisi suatu wilayah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam analisis ini, nilai KPN menggunakan total PDRB nasional. Formula berikut digunakan untuk menghitung KPN:

$$KPN = \left[\frac{X_{t1}}{X_{t0}} - 1 \right] \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

KPN = Komponen Pertumbuhan Nasional

X_{t1} = Total PDRB nasional pada periode akhir (2019)

X_{t0} = Total PDRB nasional pada periode awal (2010)

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)

KPP adalah alat untuk mengukur seberapa cepat atau lambat pertumbuhan produksi suatu wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan produksi nasional karena tingginya konsentrasi sektor industri di wilayah tersebut. KPP, juga dikenal sebagai *proportional shift*, biasanya dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan akhir, ketersediaan bahan baku, dan kebijakan sektoral. Selain itu, komponen pertumbuhan proporsional meningkat karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan struktur, dan keragaman pasar. KPP dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$KPP = \left[\frac{X_{j(t1)}}{X_{j(t0)}} - \frac{X_{t1}}{X_{t0}} \right] \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

KPP = Komponen Pertumbuhan Proporsional

$X_{j(t1)}$ = Total PDRB nasional sektor *i* pada periode akhir (2019)

$X_{j(t0)}$ = Total PDRB nasional sektor *i* pada periode awal (2010)

X_{t1} = Total PDRB nasional pada periode akhir (2019)

X_{t0} = Total PDRB nasional pada periode awal (2010)

$KPP < 0$ = Menunjukkan bahwa sektor *i* pada provinsi *j* pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama se-nasional.

$KPP > 0$ = Menunjukkan bahwa sektor *i* pada provinsi *j* pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama se-nasional.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah/KPPW

KPPW mengukur daya saing suatu sektor di suatu provinsi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di provinsi lain. KPPW terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu provinsi karena keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, dan infrastruktur ekonomi. Formula berikut digunakan untuk menghitung KPPW:

$$KPPW = \left[\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{jt1}}{X_{jt0}} \right] \dots\dots\dots (4)$$

Dimana:

KPPW = Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

$X_{ij(t1)}$ = PDRB sektor *i* di provinsi *j* pada periode akhir (2019)

$X_{ij(t0)}$ = PDRB sektor *i* di provinsi *j* pada periode awal (2010)

$X_{j(t1)}$ = Total PDRB nasional sektor *i* pada periode akhir (2019)

$X_{j(t0)}$ = Total PDRB nasional sektor *i* pada periode awal (2010)

Ketika $KPPW < 0$ artinya sektor i di provinsi j relatif tidak mempunyai daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama se-nasional.

Ketika $KPPW > 0$, sektor i di provinsi j memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama se-nasional

Teknik tipologi Klassen dapat digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan sektoral di sebuah daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB secara keseluruhan. Sektor-sektor ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor tertinggal.

Empat karakteristik pola dan struktur ekonomi yang berbeda, serta kontribusi ekonomi yang berbeda, ditemukan melalui analisis ini (Kuncoro, 2010)

- a. Sektor maju dan tumbuh pesat (*developed sector*): Ini adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat yang memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB lebih tinggi daripada nilai kontribusi sektor terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.
- b. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*). Sektor ini memiliki laju pertumbuhan PDRB yang lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB.
- b. Sektor yang potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*): Sektor ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan PDRB yang lebih besar daripada peningkatan PDRB di daerah yang menjadi rujukan, tetapi memiliki kontribusi yang lebih kecil pada PDRB daripada kontribusi daerah yang menjadi rujukan.
- c. Sektor relatif tertinggal: Sektor ini dianggap relatif tertinggal karena memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB di daerah yang menjadi rujukan dan memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap PDRB daripada daerah yang menjadi rujukan.

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan			
		$r_i > r$	$r_i < r$
Pendapatan per kapita	$y_i > y$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor maju tapi tertekan
	$y_i < y$	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Sektor relatif tertinggal

Sumber: Kuncoro, 2010 (diolah)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Location Quotation (LQ)

Dalam mempersiapkan daerah otonom baru agar menjadi lebih mandiri kedepannya, setiap daerah harus mampu mengenali potensi serta sektor unggulan atau sektor basis yang dimiliki oleh daerah baik di tingkat provinsi hingga tingkat desa. Namun sayangnya, masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam menemukan potensi serta sektor unggulan yang mereka miliki, padahal pengenalan potensi tersebut memudahkan dalam menyusun strategi untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah yang

bersangkutan. Hasil analisis LQ terhadap perekonomian wilayah Papua baik di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dan 3 berikut.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis LQ Wilayah Papua Tahun 2010

Kategori Lapangan Usaha	Papua Selatan	Papua Tengah	Papua Pegunungan	Papua Barat Daya
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	2,3	0,3	1,8	1,0
Pertambangan dan Penggalian	0,1	8,0	0,1	2,0
Industri Pengolahan	0,4	0,0	0,1	1,2
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,0	0,1	0,3	2,1
Konstruksi	1,7	0,3	1,7	1,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	0,7	0,2	0,8	0,6
Transportasi dan Pergudangan	1,4	0,3	2,4	0,7
Akomodasi dan Makan Minum	0,2	0,1	0,1	0,2
Informasi dan Komunikasi	0,8	0,3	1,0	0,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	0,1	0,2	0,4
Real Estate	0,8	0,2	1,2	0,4
Jasa Perusahaan	0,7	0,2	0,8	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,1	0,6	5,2	2,1
Jasa Pendidikan	1,1	0,1	1,4	1,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,9	0,3	2,8	1,1
Jasa lainnya	0,7	0,2	1,1	0,3

Sumber: Data diolah (2023).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis LQ Wilayah Papua Tahun 2019

Kategori Lapangan Usaha	Papua Selatan	Papua Tengah	Papua Pegunungan	Papua Barat Daya
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	2,0	0,5	1,5	1,0
Pertambangan dan Penggalian	0,2	8,7	0,2	1,6
Industri Pengolahan	0,4	0,0	0,0	0,9
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,0	0,2	0,2	2,0
Konstruksi	2,0	0,8	1,9	1,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	0,8	0,4	0,8	0,9
Transportasi dan Pergudangan	1,4	0,6	2,2	0,9
Akomodasi dan Makan Minum	0,3	0,1	0,1	0,3
Informasi dan Komunikasi	1,0	0,5	0,5	0,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	0,2	0,2	0,5
Real Estate	0,8	0,5	1,4	0,6
Jasa Perusahaan	0,5	0,4	0,5	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,6	1,6	6,4	3,2
Jasa Pendidikan	0,9	0,2	1,4	1,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,8	0,6	2,5	1,0
Jasa lainnya	0,6	0,3	0,8	0,2

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan hasil perhitungan LQ terhadap sektor perekonomian di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya menunjukkan bahwa masih terdapat sektor-sektor yang menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Pada Tabel 4 berikut memperlihatkan hasil pemetaan struktur ekonomi di 4 provinsi hasil pemekaran tersebut.

Tabel 4. Hasil Pemetaan Struktur Ekonomi Wilayah Papua

Provinsi	Sektor dengan LQ > 1 (Komoditas menjadi basis atau sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah)	Sektor dengan LQ = 1 (Komoditas tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor)	Sektor dengan LQ < 1 (Komoditas termasuk non-basis, produksi komoditas tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar)
Papua Selatan	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi; Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa lainnya
Papua Tengah	Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi; Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa lainnya
Papua Pegunungan	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi; Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa lainnya
Papua Barat Daya	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan		Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi; Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa lainnya

Sumber: Data diolah (2023).

Selain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, hampir semua provinsi pada wilayah Papua baik Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, maupun Papua Barat Daya, sektor ekonomi terbesar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, serta konstruksi. Potensi tersebut didukung dengan

mayoritas daerah yang berada pada wilayah pesisir pantai sehingga memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perikanan maupun sektor pertanian (khusus wilayah pegunungan).

Sementara Provinsi Papua Tengah basis sektor ekonomi terbesar yakni pertambangan dan penggalian. Besarnya potensi pada basis komoditas tersebut salah satunya dikarenakan banyaknya potensi bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam. Kabupaten Mimika merupakan daerah penghasil tembaga paling besar di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan sektor tahun 2010 dan tahun 2019, terjadi beberapa sektor yang mengalami transformasi dari sebelumnya merupakan sektor basis menjadi sektor non basis maupun sebaliknya dari sektor non baiss menjadi sektor basis dan subsistem. Berikut rangkuman transformasi sektor dari tahun 2010 ke tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Sektor yang Mengalami Transformasi dari Tahun 2010 ke Tahun 2019

Provinsi	Sektor yang mengalami Transformasi dari Non-Basis Menjadi Basis	Sektor yang mengalami Transformasi dari Non-Basis Menjadi Subsistem/sebaliknya	Sektor yang Mengalami Transformasi dari Basis menjadi Non-Basis
Papua Selatan	Informasi dan Komunikasi	-	Jasa Pendidikan
Papua Tengah	- Administrasi Pemerintahan, - Pertahanan, dan - Jaminan Sosial Wajib	-	-
Papua Pegunungan	-	-	- Informasi dan Komunikasi - Jasa lainnya
Papua Barat Daya	-	-	Industri Pengolahan

Sumber: Data diolah (2023).

Provinsi Papua Selatan mampu mentransformasi sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor basis dari sebelumnya non basis. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi sumber pertumbuhan dan memiliki keunggulan. Di sisi lain, selain dapat memenuhi kebutuhan pada wilayah Papua Selatan sektor ini juga dapat diekspor dan dikembangkan keluar wilayah tersebut sehingga akan mampu menambah nilai tambah ekonomi pada wilayah bersangkutan. Dalam kurun waktu yang sama, selain peningkatan sektor menjadi basis, Provinsi Papua Selatan juga mengalami penurunan peran pada sektor pendidikan. Pada tahun 2010 sektor ini memiliki nilai LQ sebesar 1,1 namun di tahun 2019 nilai tersebut turun menjadi 0,9.

Transformasi sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor basis salah satunya dapat disebabkan meningkatnya perkembangan kondisi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang ada di daerah tersebut. Menurut Kadis Kominfo Jeri Agus Yudianto beberapa wilayah Papua sudah mulai merasakan kehadiran internet, meskipun cakupannya masih terbatas diwilayah ibukota kabupaten (Adi, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa peningkatan persentase rumah tangga yang mengakses internet meningkat sebesar 19,23 persen dari 12,08 persen di tahun 2010 menjadi 31,31 persen di tahun 2019.

Peran sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib pada Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan yang cukup besar, dimana nilai LQ tahun 2010

sebesar 0,6 kemudian menjadi 1,6 pada tahun 2019. Dengan demikian sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan dan memiliki keunggulan komparatif.

Pada Provinsi Papua Pegunungan, terdapat dua sektor yang mengalami transformasi dari basis menjadi non-basis, yakni informasi dan komunikasi dan sektor jasa lainnya. Nilai LQ untuk masing-masing sektor dari sebelumnya 1 dan 1,1 pada tahun 2010 menjadi 0,5 dan 0,8 pada tahun 2019. Hal ini mengartikan bahwa Provinsi Papua Pegunungan masih membutuhkan dan bergantung pada wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan pada sektor tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan TIK masih terbatas pada wilayah tertentu, karena pembangunan infrastruktur di Papua memang tidak mudah, mengingat tantangan kondisi geografis. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja ekstra yang harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada Provinsi Papua Barat Daya juga terdapat transformasi sektor, dimana terjadinya penurunan peran sektor industri pengolahan dengan nilai LQ sebelumnya sebesar 1,2 menjadi 0,9 pada tahun 2019. Dengan demikian sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah yang bersangkutan. Jika dilihat perkembangannya, industri pengolahan khususnya pada Provinsi Papua Barat sejak 2011 cenderung mengalami penurunan (Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, 2022), padahal sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama atau lokomotif dalam memajukan perekonomian.

2. Analisis *Shift-share*

Hasil perhitungan diperoleh bahwa komponen pertumbuhan Nasional sebesar 0,59. Hal ini mengartikan bahwa ekonomi (PDB) nasional dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 tumbuh sebesar 59 persen (PDB atas harga konstan 2010). Kemudian berdasarkan hasil perhitungan komponen pertumbuhan proporsional (*KPP/proportionally shift*) pada tingkat nasional, diperoleh data yang ditampilkan di Tabel 6.

Tabel 6. Komponen Pertumbuhan Proporsional Nasional 2010-2019

Sektor Lapangan Usaha	KPP
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,19
Industri Pengolahan	-0,09
Informasi dan Komunikasi	0,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25
Jasa Lainnya	0,43
Jasa Pendidikan	0,10
Jasa Perusahaan	0,49
Konstruksi	0,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04
Pertambangan dan Penggalian	-0,47
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,18
Real Estat	0,00
Transportasi dan Pergudangan	0,29
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,06

Sumber: Data diolah (2023).

Pada Tabel 6 di atas, memperlihatkan bahwa komponen pertumbuhan proporsional pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pengadaan listrik dan gas memiliki nilai minus atau <0 . Hal ini mengartikan bahwa pada sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan lebih lambat dari pertumbuhan produksi nasional.

Sementara sektor lainnya seperti informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa keuangan dan asuransi, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, *real estate*, transportasi dan pergudangan memiliki nilai komponen pertumbuhan proporsional yang positif atau > 0 yang mengartikan bahwa pertumbuhan produksi pada sektor tersebut lebih cepat dari pertumbuhan produksi nasional. Di sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*KPPW/differential shift*) diperoleh hasil seperti sebagaimana pada Tabel 7 berikut

Tabel 7. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Papua

Sektor Lapangan Usaha	Papua Selatan	Papua Tengah	Papua Pegunungan	Papua Barat Daya
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,37	0,66	0,56	0,64
Industri Pengolahan	-0,02	0,14	-0,07	-0,22
Informasi dan Komunikasi	1,69	0,28	0,08	0,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,40	0,57	0,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,37	0,03	0,38	0,86
Jasa Lainnya	0,28	0,35	0,34	0,35
Jasa Pendidikan	0,24	0,25	0,54	0,34
Jasa Perusahaan	0,38	0,27	-0,10	0,22
Konstruksi	0,94	0,85	0,93	0,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	-0,20	-0,12	0,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,57	0,48	0,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,68	0,68	0,47	0,89
Pertambangan dan Penggalian	0,52	-0,75	0,45	-0,55
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,06	0,05	-0,04	-0,01
Real Estat	0,30	0,44	0,68	0,72
Transportasi dan Pergudangan	0,60	0,56	0,52	0,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	0,27	0,18	0,42

Sumber: BPS, 2022.

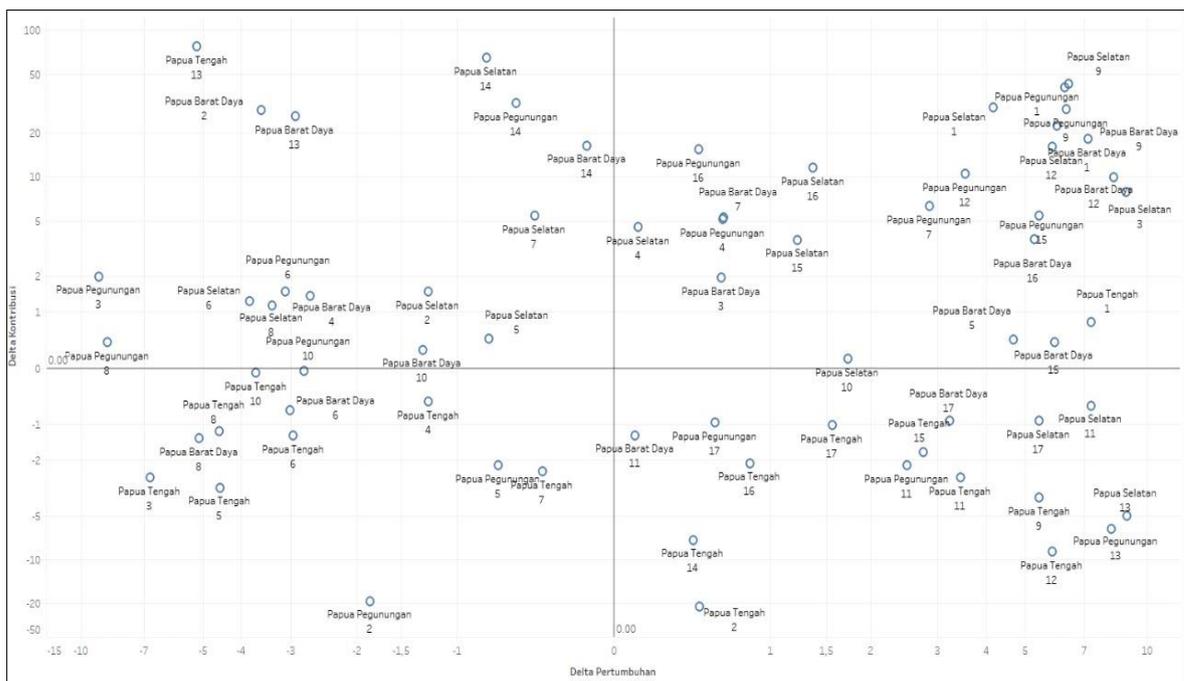
Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas sektor-sektor khususnya pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa keuangan dan asuransi, jasa lainnya, jasa pendidikan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, *real estate*, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas pada wilayah Papua baik Papua Selatan, Tengah, Pegunungan dan Barat Daya memiliki nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah positif atau >0 , hal ini mengartikan bahwa sektor-sektor tersebut yang berada pada wilayah Papua Selatan, Tengah, Pegunungan dan barat

Daya memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala nasional.

Sementara nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya pada Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya memiliki nilai negatif atau <0 . Hal ini mengindikasikan bahwa baik sektor industri pengolahan maupun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif tidak memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala nasional. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode *shift-share* Kota Sorong yang termasuk dalam lokasi prioritas berorientasi pengembangan kegiatan industri pengolahan pun, mengalami pelambatan pada sektor tersebut (Salokary dan Matulesy, 2019). Kurangnya daya saing sektor-sektor tersebut dapat disebabkan turunnya keunggulan komparatif, akses pasar input dan output maupun infrastruktur ekonomi (Haryanto, 2021).

3. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen membagi wilayah menjadi empat yakni kuadran I adalah sektor maju dan tumbuh pesat, kuadran II adalah sektor maju tapi tertekan, kuadran III sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat dan kuadran IV adalah sektor relatif tertinggal. Berikut hasil klasifikasi tipologi Klassen pada wilayah Papua (Gambar 2).



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 10. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang |
| 2. Industri Pengolahan | 11. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| 3. Informasi dan Komunikasi | 12. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 13. Pertambangan dan Penggalian |
| 5. Jasa Keuangan dan Asuransi | 14. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 6. Jasa Lainnya | 15. Real Estat |
| 7. Jasa Pendidikan | 16. Transportasi dan Pergudangan |
| 8. Jasa Perusahaan | 17. Pengadaan Listrik dan Gas |
| 9. Konstruksi | |

Gambar 2. Hasil Klasifikasi Tipologi Klassen

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil tipologi Klassen sebagaimana terlihat dalam Gambar 2, menunjukkan bahwa pada seluruh wilayah Papua baik pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada pada kuadran I. Artinya, sektor ini memiliki rata-rata pertumbuhan yang tinggi serta kontribusi PDRB yang besar daripada rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDRB Nasional. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wulandari (2021) bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menjadi salah satu sektor unggulan khususnya pada Provinsi Papua Barat. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan pengadaan listrik dan gas pada seluruh wilayah Papua berada pada kuadran III yang berarti potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sektor tersebut agar sektor tersebut lebih maju dan memiliki daya saing.

V. KESIMPULAN

Pada tahun 2022 telah disahkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai pemekaran wilayah di Papua. Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Papua. Sementara pada Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi 2 wilayah, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Faktor besarnya luas wilayah di Papua, menjadi salah satu unsur utama yang mendasari dilakukannya pemekaran wilayah di Papua. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode LQ dan *shift-share* menunjukkan bahwa di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih terdapat sektor yang menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Hasil pemetaan sektor tahun 2010 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sektor yang mengalami transformasi yakni sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa lainnya dan industri pengolahan. Kemudian analisis *shift-share* menunjukkan bahwa baik sektor industri pengolahan maupun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan relatif belum memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala nasional. Selain itu, berdasarkan hasil tipologi Klassen pada seluruh wilayah Papua, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada pada kuadran I. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan pengadaan listrik dan gas pada seluruh wilayah Papua berada pada kuadran III.

Pemerintah DOB perlu melakukan pemetaan dan pembangunan berdasarkan sektor-sektor strategis dan sektor unggulan di daerahnya. Pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya akan mempercepat pembangunan di DOB tersebut. Untuk itu, selain dukungan insentif, diperlukan juga dukungan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah di DOB untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah. Investasi pada sektor-sektor unggulan juga menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan sektor unggulan di DOB. Dengan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan sektor potensial dan sektor unggulan yang dimilikinya, harapannya dapat mendorong terjadinya percepatan pembangunan di wilayah Papua, sehingga akan meningkatkan indikator pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

Perlunya memperkuat daya saing sektor daerah dalam hal ini sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya pada wilayah Papua Selatan Pegunungan dan Barat Daya, mengingat sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang kurang progresif dan kurang memiliki daya saing. Kebijakan perlu diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam maupun peningkatan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

industri pengolahan harus mampu memberi nilai tambah (*value added*) pada produk-produk sektor primer. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat penting untuk terus dikembangkan selain untuk pemenuhan pangan, juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rio. (2021). Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital di Papua. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-530748-Teknologi-upaya-mengurangi-kesenjangan-digital-di-papua.html>
- BPS. 2023. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah 2010-2019, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/2/398/2/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>
- Constantine, C. M. (2017). Economic structures, institutions and economic performance. *Journal Economic Structures* 6(2), 1-18.
- De Fretes, P. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi (*Shift-share*), Dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.384>.
- Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat. 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Beberkan Potret Industri, diakses dari <https://diskominfoerstatik.papubaratprov.go.id/home/2022/03/22/kepala-badan-pusat-statistik-papua-barat-beberkan-potret-industri-berikut-selengkapnya/>
- Djadjuli, R. Didi. (2018). Peran pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Firman, Firman & Parinusa, Sisilia & Maspaitella, Marcus. (2023). Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Provinsi Papua Barat Pendekatan Input - Output. *Lensa Ekonomi*. 17. 17. 10.30862/lensa.v17i01.277.
- Haryanto. (2021). Analisis Transformasi Struktur Ekonomi & Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan *Shift-share*): Kajian Isu Strategis Pembangunan Nasional Transformasi Ekonomi: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa dan Bali. Vol IV No.2 September 2021.
- ILO. (2004). *Statistical Definition of Informal Employment: Guidelines Endorsed by the 17th International Conference of Labour Statisticians*. Geneva: Switzerland.
- Kholik, Saeful. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justita*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Vol.6 No.1-Juni 2020, hlm 56-70.
- Kurniawati, Dita Ayu, & Cahyono, Hendry. (2022). Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Analisis Sektor Unggulan di Papua. *Jurnal of Economics*. Vol.2 Nomor 3, Hlm.49-63.
- Maspaitella, M., Parinussa, S. M., & Ketysia Imelda tewernusa. (2021). Applying *Location Quotient* and *Shift-Share* Analysis in Determining Leading Sectors in Teluk Bintuni

- Regency. JDE (Journal of Developing Economies), 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i1.22182>.
- Masruri, Farycha. (2020). Analisis Daya Saing Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2011-2028 (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua). Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2020.
- Mulia, R.A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2016). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- Nurlina, Andiny, Puti., Sari, Maulia. (2019). Analisis Sektor Unggulan Aceh Bagian Timur. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol 10 No 10.
- Putra, E.D, & Maria, C.Y.P. (2019). Identification of Leading Sector and Cluster Analysis of Regencies in Kalimantan. Economics Development Analysis Journal. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.27237>.
- Putri, E. I. K., Achسانی, N. A., & Kolopaking, L. (2016). Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.2.4>
- Rahayu, Y. P., Maspaitella, M. R., & Tewernusa, K. I. (2018). Analisis Pergeseran Sektor Potensial dan Sektor Unggulan dalam Perekonomian Kabupaten Kaimana Periode 2010-2015. Ilmu Sosial KnE. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3195>
- Randy, Muh. Fuad, Ilyas, Muh. Indra Fauzi, Sumarlin, Abdul. (2019). Penerapan LQ dan *Shift-share* dalam mengukur pertumbuhan Ekonomi di provinsi sulawesi selatan Periode Tahun 2013-2017. Jurnal STIE Semarang. Vol. 11 No.2 Edisi Juni 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Ridhuan, Syamsu. (2019). Otonomi Daerah. Modul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Esa Unggul. 2019.
- Rosmeli. (2022). Leading Sector Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17. No.3, Juli September 2022 ISSN: 2085-1960 (print); 2684 -7868 (online).
- Salakory, Hans S.M & Matulesy, Febby Sonya. 2019. Analisis Shift-Share Terhadap Perekonomian Kota Sorong. Berekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan
- Sanga, K.P., Hermanto, S.B., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 19(2), 67 – 81.
- Silalahi, Sahat. (2011). Analisa Penentuan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan Perekonomian Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Ekonomi, Vol.4(3), 285-305.

- Sintia, I. (2017). kemandirian keuangan daerah berimplikasi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Prodi Akuntansi Fekon Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, 1–21.
- Tarigan, R., (2014), Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Maret 2014, Diterbitkan oleh PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Viphrindratin, S., & Cahyo, H. (2016). Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res*, 5(2), 272-285.
- Wulandari, Indah. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Sektor Unggulan Di Provinsi Papua Barat. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/37847>
- Yulianti, A. (2019). Potensi Sektor Unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.22219/jep.v17i1.9625>